

## Rapat Pertanggungjawaban APBD 2010

# Dua Fraksi DPRD Walk Out

Mempawah, BERKAT.

Pelaksanaan rapat paripurna DPRD terkait Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pontianak 2010 yang dipimpin Wakil Ketua, H. Rusli Abdullah, SE, diwarnai dengan aksi walk out dari dua fraksi, yakni Demokrat dan Rakyat Bersatu.

Rapat yang sejak awal sudah berlangsung alot dan dihujani instruksi dari para anggota kepada pimpinan DPRD, karena Fraksi Demokrat dan Rakyat Bersatu, bersikukuh menginginkan pelaksanaan rapat paripurna ditunda, sampai pihak eksekutif memperbaiki data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI kepada Pemkab Pontianak, yang berbeda dengan yang diterima DPRD.

"Kami dari Fraksi Rakyat Bersatu, secara tegas meminta sidang ditunda, karena data BPK dari hasil LHP kepada Pemkab Pontianak, berbeda dengan yang diterima DPRD. Diantaranya, perbedaan jumlah anggaran hasil LHP BPK RI, yakni Rp 14 milyar lebih, sedangkan data dari Pemkab Rp 15 milyar lebih," beber Ketua Fraksi Rakyat Bersatu, Darwis, SH.

Selain itu, Fraksi Rakyat Bersatu dan Demokrat, juga menyoroti LHP BPK, yang di dalamnya tidak memasukan nama salah satu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Pontianak, Sabli Awalludin, SE.



BUPATI RIA NORSAN MENERIMA PU FRAKSI DARI WAKIL KETUA DPRD, RUSLI ABDULLAH.

FOTO PISA

Begitu juga dengan draft perubahan APBD 2010, juga banyak perbedaan data di dalamnya. "Kami minta data ini diperbaiki agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, serta ada kesimpulan data yang akurat," tegas Darwis.

Hal serupa juga disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Widdiansyah, SE yang juga menyatakan menolak memba-

cakan PU Fraksi. "Menjaga marwah partai, karena nama unsur pimpinan kami, Sabli Awalludin, tidak masuk dalam LHP BPK. Maka, fraksi kami secara tegas tidak akan membacakan PU," imbuhnya.

Berbeda dengan dua fraksi ini, keempat fraksi DPRD Kabupaten Pontianak lainnya, yaitu Fraksi GOHAN, PDI Perjuangan, PPP dan P2KB, meminta

rapat paripurna PU Fraksi DPRD tetap dilanjutkan sesuai jadwal yang sudah disepakati.

"Kami di Fraksi PDI Perjuangan tetap meminta sidang ini dilanjutkan. Kalau memang ada pro dan kontra ataupun keberatan dengan data yang sudah ada, seharusnya disampaikan melalui PU," kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Susanto, SE.

Jika jawaban dan penjelasan eksekutif masih tidak memuaskan, lanjut Susanto, maka bisa dilanjutkan melalui rapat gabungan. "Jika masih tidak ada titik temu, kita bisa memanggil BPK RI untuk meminta penjelasan terkait hal ini, karena semuanya sudah diatur dalam undang-undang," cetusnya.

Usai rapat paripurna, Bupati Pontianak, Drs. H. Ria Norsan, MM, MH, yang dikonfirmasi wartawan terkait adanya laporan ganda dari LHP BPK RI, dengan tegas membantah. Menurutnya, laporan itu tidak ganda, karena selain dari BPK RI, laporan itu juga dibuat oleh Penikab Pontianak sesuai Perda 2010 setelah diaudit oleh BPK dan disampaikan LHP.

"Memang terjadinya perbedaan data antara laporan yang dikeluarkan BPK RI dengan yang dibuat Pemkab Pontianak. Tapi perbedaan itulah yang akan kita bahas melalui rapat paripurna DPRD ini," pungkasnya. (psa)